

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran surah An-Nisa/4:58.

Adi, Priyo Hari. (2006). “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)”. *Simposium Nasional Akuntansi 9* Padang, Sumatera Barat.

Anggraini, N. R. dan Riharjo, I. B. (2017). “Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Dengan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Pemoderasi”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6), pp. 1–23.

Ariansyah, A. et al.,. (2014). “Tingkat Ketergantungan Fiskal dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi”. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1 (3).

Asako, Y., T. Iida, T. Matsubayashi dan M. Ueda. (2012). “Dynastic Legislators: Theory And Evidence From Japan”, *Working Papers*, Waseda University Organization for Japan-US Studies.

Brodjonegoro, B., dan Martinez, J. (2002). “An analysis of Indonesia’s transfer system: Recent performance and future prospects”, presented at The Andrew Young School of Policy Studies sponsored conference on “Can Decentralization Help Rebuild Indonesia?”, Georgia State University, Atlanta.

Darmawati. (2017). “Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidapatuhan Terhadap Perundangundangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini BPK RI”. *Tesis*. Universitas Lampung.

David, R. (2017). “Contribution of Records Management to Audit Opinions and Accountability in Government”. *South African Journal of Information Management*, 1–15.

Dwirandra, A. A. N. . (2008). “Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), pp. 1–21.

Elmaleh, M. S. (2006). “The Reliability and Accuracy of Financial Statements. Retrieved” from [http:// www.understand-accounting.net/TheReliability and Accuracy of financial statements.html](http://www.understand-accounting.net/TheReliability and Accuracy of financial statements.html)

- Erryana, V. dan Setyawan, H. (2016). “Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah)”, *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(1), pp. 1–14.
- Fontanella, A. dan Rossieta, H. (2014). “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”, *Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok*, pp. 1–65.
- Gujarati, Damodar N. dan Porter, Dawn C. (2012). “Dasar-dasar Ekonometrika”. Bk 1 Ed 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A (2001). “Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan”. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2014). “Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya : Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung”. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa.
- Halim, A dan Kusufi, M. S. (2012). “Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah”. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, Jogiyanto. (2016). “Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman”. Ed 6. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi. (2007). “Manajemen Kinerja Sektor Publik”. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M, Firma. S, dan Heribertus. (2006). “Akuntansi Sektor Publik”. Ed 1. Yogyakarta: BPFE.
- Manurung, D. T. H. (2012). “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangkaraya”, *JINAH (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika)*, 2(1), pp. 1–30.
- Mardiasmo. 2002. “Akuntansi Sektor Publik”. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Marfiana, N. dan Kurniasih, L. (2013). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, *Journal and Proceeding Universitas Jenderal Soedirman*, 3(1), pp. 1–16.
- Mendoza, R.U., Beja Jr, E.L., Venida, V.S., dan Yap, D.B. (2013). “Political Dynasties and Poverty: Resolving The „Chicken or The Egg” Question”, *Working Paper*, Asian Institute of Management.

- Moisiu, A. (2013) “Decentralization and the Increased Autonomy in Local Governments”, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, pp. 459–463.
- Mudhofar, K. dan Tahar, A. (2016). “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17(2), pp. 176–185.
- Munawar, Abdullah, S., dan Nadir, N. (2016). “Pengaruh Jumlah Temuan Audit Atas SPI dan Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh”. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(2).
- Nazaruddin, I., dan Basuki, A. T. (2019). “Analisis Statistik dengan SPSS”. Ed.1. Yogyakarta: Danisa Media.
- Nuritomo dan Rossieta, H. (2014). “Politik dinasti, Akuntabilitas, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”, *Simposium Nasional Akuntansi 17*, pp. 1–37.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pramono, Joko. (2014). “Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, *Among Makarti*, 7(13), pp. 83-112.
- Prianto, B. (2016). “Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), pp. 105–117.
- Priyatno, Duwi. (2010). “Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendaran”. Ed 1. Yogyakarta: Gava Media.
- Purbasari, H. dan Bawono, A. D. B. (2017). “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), pp. 102–108.
- Querrubin, P. (2010). “Family and Politics: Dynastic Persistence in the Philippines”, *Working Paper*, Massachusetts Institute of Technology.

- Raharjo, E. (2007). "Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi", *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1), pp. 37–46.
- Rasmini, N. K. dan Masdiantini, P. R. (2018). "Fiscal Decentralization, Internal Control System, Accountability of Local Government and Audit Opinion", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), pp. 123–132.
- Riyadi, Slamet, dan Yulianto. (2014). "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Jurnal Akuntansi*.
- S Purnomo, B. (2017). "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), p. 276.
- Sadjiarto, A. (2000). "Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), pp. 138–150.
- Santoso, S. (2010). "Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS". Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Schneider, M. and Damanpour, F. (2002). "Public choice economics and public pension plan funding an empirical test", *Administration and Society*, 34(1), pp. 57–86. doi: 10.1177/0095399702034001005.
- Sofyani, H., dan R. Akbar. (2013). "Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10 (2), 184-205.
- Tahar, A. dan Zakhiya, M. (2011). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), pp. 88–99.
- Wijaya, A. H. C. dan R. Akbar. (2013). "The Influence of Information, Organizational Objective and Targets, and External Pressure toward The Adoption of Performance Measurement System in Public Sector". *Journal of Indonesian Economy and Business*, 28, 62-83.
- Williams, M. (2001). "Are Intellectual Capital Performance and Disclosure Practice Related?". *Journal of Intellectual Capital*, 2 (3), 192-203.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 2.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<https://www.bpk.go.id/>

<https://www.kemenkeu.go.id/>

<https://www.kemendagri.go.id/>